



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) K O T A D U M A I

**bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025



Alamat: JL. HR Soebrantas Kota Dumai
email Email : bpbdkotadumai@yahoo.com



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Neomor 1 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencanapendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II KETENTUAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta matrik Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dihitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2025.

- (3) Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Salah satu bahan penyusunan Rancangan KUA/PPAS, khususnya Program/ Kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2025; dan
 - b. Bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, setelah tercantum dalam KUA/PPAS.
- (4) Penyajian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (5) Penjabaran Renja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 Juli 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 27 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 13 SERI D

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita serahkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya serta menuntun dan membimbing kita sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.


Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai merupakan salahsatu bukti keseriusan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis kinerja dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah, dan menyesuaikan dengan Program Prioritas walikota terpilih yang nantinya Rencana Kerja ini dapat dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana guna meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja Perubahan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2025 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2025 ini sebagai langkah perbaikan dimasa mendatang sebagai upaya kami untuk meningkatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*).

Demikian Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 07 Juli 2025

Kepala Pelaksana,



IRAWAN SUKMA, AP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP.197508161996031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan Kedua	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kota Dumai.....	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kota Dumai	24
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KOTA DUMAI	32
BAB IV PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja BPBD Kota Dumai TWII	10
TABEL 2.2	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran IKU Tahun 2024	18
TABEL 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Dumai	23
TABEL 2.4	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan	24
TABEL 2.5	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan BPBD Kota Dumai Berdasarkan Telaah Visi, Misi, dan Program Tahun 2021-2026	27
TABEL 3.1	Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2025	35

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	Form Hasil Penilaian IKD BPBD Kota Dumai	17
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun berjalan pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mempedomani Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, dan Renja Provinsi. Adapun proses/tata cara penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah:

Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan ini berpedoman pada:

- a. Rancangan perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. RIPB
- d. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Penyusunan rancangan perubahan Renja terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja ini disampaikan kepada Wali Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah diathermia. Verifikasi ini bertujuan untuk

memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran.

Penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan apabila ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai. Penyempurnaannya diserahkan kembali ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah:

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan akhir ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Rancangan akhir perubahan Renja ini disampaikan kepada Walikota melalui Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan apabila ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai dan menyampaikannya kembali ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Verifikasi rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

3. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai menyampaikan seluruh rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan

Keputusan Walikota ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2025 ini mempedomani hasil evaluasi capaian kinerja triwulan II tahun anggaran 2024, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Visi Misi Walikota Periode Tahun 2021-2026 serta penyesuaian Visi dan Misi Walikota terpilih. Perumusan rancangan perubahan Renja ini mencakup:

- 1) Analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai;
- 2) Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024; dan
- 3) Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Rancangan perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2025 ini akan disampaikan kepada Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk diverifikasi agar penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu idikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2025.

Rancangan perubahan Renja ini akan disempurnakan berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Dumai. Selanjutnya rancangan perubahan Renja yang telah diverifikasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan akhir perubahan RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2025 akan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum perumusan Rancangan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Minimal;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E)

22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.
23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025 (per tanggal 1 Juli 2025).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen rancangan perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ini mengacu pada permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan renja, landasan hukum yang digunakan, maksud dan tujuan penyusunan perubahan renja dan Sistematika

penyusunan perubahan renja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.

Berisi tentang revidi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Capaian IKU sampai dengan Triwulan II. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2025 sampai dengan Triwulan Kedua

Mempedomani peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap perencanaan harus dievaluasi pelaksanaannya. Perubahan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pun demikian adanya, harus dilakukan evaluasi melalui 3 (tiga) tahap yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan suatu upaya pemantauan/supervisi yang dilakukan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi suatu program/kegiatan dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan pada saat evaluasi, selanjutnya akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan pada setiap program/kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun rencana.

Sedangkan evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2025 sampai dengan TW II dilakukan untuk memastikan agar target-target program/kegiatan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2025 dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2025. Jika sampai dengan TW II ditemukan program/kegiatan yang target-targetnya tidak mungkin terealisasi sampai dengan akhir tahun rencana, maka akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai pada akhir tahun

rencana.

Berkaitan dengan telah disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 87 Tahun 2020, tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044, bahwa untuk mencapai ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan terhadap bencana, diperlukan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif serta terintegrasi menuju Indonesia emas 2045, dalam menyongsong satu abad Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mencanangkan Visi Indonesia 2045 yakni "Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur" untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Visi Indonesia 2045 ini merupakan upaya antisipatif bangsa dalam menghadapi perubahan dunia, yang salah satunya meliputi perubahan kondisi bumi dengan berbagai konsekuensi seriusnya bagi keselamatan bangsa. Mengacu pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029, yang mana dalam Rencana Nasional (RENAS) Penanggulangan Bencana meliputi:

1. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
2. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. Analisis kemungkinan dampak bencana;
4. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
5. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
6. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Selain untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara Nasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Dumai yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Trantibum Linmas Sub Urusan Bencana yang melayani Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung Visi dan Misi walikota terpilih dengan mendukung Program Prioritas yaitu "**Pembentukan Unit Reaksi Cepat Terpadu Kegawatdaruratan dan Penyelamatan**". Untuk mendukung program prioritas tersebut diperlukan adanya penyesuaian program kegiatan. Adapun Realisasi Kinerja sampai Triwulan II Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 TWII

Formulir E. 8.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah akumulasi Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah akumulasi Tahun 2021-2024		Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dari Triwulan I- Triwulan II Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8				9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemungutan usulan pemerintahan bidang ketransmian dan keterlibatan umum serta perlindungan masyarakat (BPBD)	100%	Rp 43.430.115.369	117,95	Rp 21.910.632.925	6.363.119.185,85		1.085.723.975	1.335.309.941					2.421.033.916	117,95	Rp 24.331.666.841	118%	56%	BPBD Kota Dumai					
		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	40 Dokumen	Rp 251.524.500	40,64	Rp 53.200.800	19.160.555,80	0	0	0				3	0	43,64	Rp 53.200.800	109%	21%	BPBD Kota Dumai					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Rp 77.624.500	68,9	Rp 46.450.800	15.004.335,80	0	0	0				3	0	71,9	Rp 46.450.800	553%	60%	BPBD Kota Dumai					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	Rp 59.400.000	31,99	Rp 6.750.000	1.952.600,00	0	0	0				3	0	34,99	Rp 6.750.000	389%	11%	BPBD Kota Dumai					
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	Rp 29.400.000	0	Rp -	2.203.620,00	0	0	0				2	0	2	Rp -	-	33%	0%	BPBD Kota Dumai				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	21 Dokumen	Rp 18.335.297.715	81,09	Rp 15.538.748.957	3.832.583.783	687.117.528	696.380.729					53	1.383.498.257	134	Rp 16.922.247.214	639%	92%	BPBD Kota Dumai					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195 Orang	Rp 18.115.628.663	7,61	Rp 15.479.860.305	50 Orang/bulan	3.815.072.000	687.117.528	692.306.229				50	1.379.423.757	58	Rp 16.859.284.062	30%	93%	BPBD Kota Dumai					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	Rp 84.707.552	97,07	Rp 49.776.852	11.011.783	0	0	4.074.500				2	4.074.500	99	Rp 53.851.352	991%	64%	BPBD Kota Dumai					
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	Rp 94.461.500	170,18	Rp 41.478.400	1 Dokumen	6.500.000	0	0				1	0	171,18	Rp 41.478.400	3424%	44%	BPBD Kota Dumai					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20 Dokumen	Rp 146.083.900	136,01	Rp 74.000.000	19.400.000	0	0	0				2	0	138	Rp 74.000.000	690%	51%	BPBD Kota Dumai					
		Peratuaasaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Peratuaasaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	Rp 86.383.900	136,01	Rp 74.000.000	2 Laporan	19.400.000	0	0				2	0	138,01	Rp 74.000.000	1725%	86%	BPBD Kota Dumai					
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66 Orang	Rp 1.297.930.000	9,12	Rp 370.833.800	0	0	0					0	0	9,12	Rp 370.833.800	14%	29%	BPBD Kota Dumai					
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	155 Paket	Rp 362.990.000	2,47	Rp 102.668.000	0 Paket	0	0	0				0	0	2,47	Rp 102.668.000	2%	28%	BPBD Kota Dumai					
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	Rp 338.420.000	0	Rp 49.500.000	0 Orang	0	0	0				0	0	0	Rp 49.500.000	0%	15%	BPBD Kota Dumai					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	Rp 428.520.000	37,50	Rp 218.665.800	0 Orang	0	0	0				0	0	37,5	Rp 218.665.800	144%	51%	BPBD Kota Dumai					

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	17 Dokumen	Rp	3.885.396.248	81,24	Rp	1.947.521.230		292.154.157,05	700.000	83.333.080				8	84.033.080	89,24	Rp	2.031.554.310	525%	52%	BPBD Kota Dumai
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp	231.444.000	219,95	Rp	39.916.400	1 Paket	14.373.400	0	2.590.000				1	2.590.000	220,95	Rp	42.506.400	5524%	18%	BPBD Kota Dumai
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp	614.176.790	256,48	Rp	370.190.200	1 Paket	42.557.094,05	0	18.068.000				1	18.068.000	257,48	Rp	388.258.200	5150%	63%	BPBD Kota Dumai
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp	472.052.264	176,04	Rp	166.780.700	1 Paket	30.382.583	0	8.356.000				1	8.356.000	177,04	Rp	175.136.700	3541%	37%	BPBD Kota Dumai
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Rp	119.992.900	296,50	Rp	93.589.400	1 Paket	5.000.000	0	0				1	0	297,5	Rp	93.589.400	5950%	78%	BPBD Kota Dumai
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Paket	Rp	45.230.000	156,25	Rp	16.650.000	1 Dokumen	5.050.000	700.000	2.100.000				1	2.800.000	157,25	Rp	19.450.000	3145%	43%	BPBD Kota Dumai
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Rp	138.000.000	0	Rp	-	1 Paket	16.770.000	0	0				1	0	1	Rp	-	33%	0%	BPBD Kota Dumai
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Rp	1.742.489.994	266,84	Rp	1.241.223.130	1 Laporan	168.653.080	0	49.769.080				1	49.769.080	267,84	Rp	1.290.992.210	5357%	74%	BPBD Kota Dumai
	Peratausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Peratausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	Rp	505.510.300	92,35	Rp	19.171.400	1 Dokumen	9.368.000	0	2.450.000				1	2.450.000	93,35	Rp	21.621.400	2334%	4%	BPBD Kota Dumai
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	275 Unit	Rp	7.424.916.470	3,19	Rp	4.048.208.070		68.908.000	0	24.288.000				0	24.288.000	3,19	Rp	4.072.496.070	1%	55%	BPBD Kota Dumai
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Rp	2.468.500.000				0 Unit	0	0	0				0	0	0	Rp	-	0%	0%	BPBD Kota Dumai
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 unit	Rp	432.000.000	0	Rp	-	10 Unit	44.620.000	0	0				10	0	10	Rp	-	333%	0%	BPBD Kota Dumai
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	86 Unit	Rp	721.913.400				12 Unit	24.288.000	0	24.288.000				12	24.288.000	12	Rp	369.473.000	14%	51%	BPBD Kota Dumai
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	19 Dokumen	Rp	7.706.374.532	72,68	Rp	4.453.181.968		1.642.962.640	376.996.447	423.678.132				3	800.674.579	75,68	Rp	5.253.856.547	398%	68%	BPBD Kota Dumai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Rp	663.842.412	217,11	Rp	306.628.508	1 Laporan	115.300.000	14.896.447	14.101.892				1	28.998.339	218,11	Rp	335.626.847	4362%	51%	BPBD Kota Dumai
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Rp	556.476.000	224,96	Rp	493.620.000	1 Laporan	83.995.200	0	36.520.000				1	36.520.000	225,96	Rp	530.140.000	4519%	95%	BPBD Kota Dumai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Rp	6.406.046.120	217,26	Rp	3.649.423.460	1 Laporan	1.443.667.440	362.100.000	373.056.240				1	735.156.240	218,26	Rp	4.384.579.700	4365%	68%	BPBD Kota Dumai
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	659 Unit	Rp	4.382.592.004	2,83	Rp	1.906.323.114		487.950.050	20.910.000	107.630.000				100	128.540.000	102,83	Rp	2.034.863.114	16%	46%	BPBD Kota Dumai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	400 Unit	Rp	3.049.782.726	4,09	Rp	1.575.087.464	50 Unit	329.962.000	20.910.000	107.630.000				50	128.540.000	54,09	Rp	1.703.627.464	14%	56%	BPBD Kota Dumai
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	Rp	447.721.800	0	Rp	47.921.800	50 Unit	50.700.050	0	0				50	0	50	Rp	47.921.800	20%	11%	BPBD Kota Dumai
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	Rp	859.477.478	0	Rp	266.088.850	68 Unit	107.288.000	0	0				68	0	68	Rp	266.088.850	850%	31%	BPBD Kota Dumai

	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100%	Rp	23.316.442.200	1,96	Rp	8.897.754.982	1.005.583.464,90	18.000.000	228.363.400	246.363.400	1,96	Rp	9.144.118.382	2%	39%	BPBD Kota Dumai			
	Pelayanan Informasi Rawan Benca Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	15000 Orang	Rp	794.100.000	0,16	Rp	409.950.748	35.000.000	0	0	5000	0	5000,16	Rp	409.950.748	33%	52%	BPBD Kota Dumai		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan empat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	15100 Orang	Rp	835.289.000	0,16	Rp	69.351.000	5000 Orang	35.000.000	0	0	5000	0	5000,16	Rp	69.351.000	33%	8%	BPBD Kota Dumai	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		18 Dokumen	Rp	7.569.816.403	43,84	Rp	3.471.986.817	448.613.292,70	0	193.603.400	193.603.400	932,84	Rp	3.665.590.217	5182%	48%	BPBD Kota Dumai			
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	9 Dokumen	Rp	400.000.000				4 Kegiatan	Rp	25.680.000	0	0	4	0	4	Rp	-	44%	0%	BPBD Kota Dumai
	Penyediaan Peralatan Perfundangan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Pelugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan empat tinggalnya	170 Unit	Rp	584.000.000				50 Unit	Rp	38.331.413,70	0	0	50	0	50	Rp	-	29%	0%	BPBD Kota Dumai
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	2400 Orang	Rp	285.000.000				800 Orang	Rp	30.000.000	0	0	800	0	800	Rp	-	33%	0%	BPBD Kota Dumai
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	255 Keluarga	Rp	585.000.000	0	Rp	97.151.000	12 Keluarga	57.083.232	0	0	12	0	12	Rp	97.151.000	5%	17%	BPBD Kota Dumai	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	7 Kawasan	Rp	600.000.000				2 Kawasan	21.708.000	0	0	2	0	2	Rp	-	29%	0%	BPBD Kota Dumai	
	Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (trc) bencana kabupaten kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	44 Orang	Rp	851.856.180	13,90	Rp	486.892.720	0 Orang	0	0	0	0	13,9	Rp	486.892.720	32%	57%	BPBD Kota Dumai		
	Penyusunan rencana kontijensi kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	3 Dokumen	Rp	420.000.000				1 Dokumen	36.448.000	0	0	1	0	1	Rp	-	33%	0%	BPBD Kota Dumai	

	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana RPB Kabupaten/Kota Sampai Dengan Dinyatakan Sah/ Legal	3 Dokumen	Rp	250.800.000			Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-	0%	0%	BPBD Kota Dumai
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maksudat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	11 laporan	Rp	2.786.760.223	95,10	Rp	2.554.422.107	1 Laporan	9.150.000	0	0	1	0	96,1	Rp	2.554.422.107	874%	92%	BPBD Kota Dumai
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	Rp	325.400.000	69,45	Rp	208.332.490	1 Dokumen	193.603.600	0	193.603.400	1	193.603.400	70,45	Rp	401.935.890	7045%	124%	BPBD Kota Dumai
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	36 Kawasan	Rp	481.000.000	18,02	Rp	125.188.500	18 Kawasan	36.609.047	0	0	18	0	36,02	Rp	125.188.500	100%	26%	BPBD Kota Dumai
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kejadian penangangan bencana	19 Dokumen	Rp	8.947.275.562	133,68	Rp	4.179.559.070		346.001.172,20	18.000.000	10.800.000	94	28.800.000	227,68	Rp	4.208.359.070	1198%	47%	BPBD Kota Dumai
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5 Dokumen	Rp	1.748.569.039	275,99	Rp	1.561.247.463	1 Dokumen	106.143.125	18.000.000	10.800.000	1	28.800.000	276,99	Rp	1.590.047.463	5540%	91%	BPBD Kota Dumai
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	150 Orang	Rp	640.500.000				50 Orang	15.087.500	0	0	50	0	50	Rp	-	33%	0%	BPBD Kota Dumai
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	3 Dokumen	Rp	135.000.000				0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	Rp	-	0%	0%	BPBD Kota Dumai
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	60 Orang	Rp	730.000.000				20 Orang	26.589.800	0	0	20	0	20	Rp	-	33%	0%	BPBD Kota Dumai
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60 Orang	Rp	1.018.100.000				20 Orang	30.000.000	0	0	20	0	20	Rp	-	33%	0%	BPBD Kota Dumai
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	3 Dokumen	Rp	189.000.000				1 Dokumen	12.881.000	0	0	1	0	1	Rp	-	33%	0%	BPBD Kota Dumai
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	3 Laporan	Rp	166.000.000				1 Laporan	14.791.747,20	0	0	1	0	1	Rp	-	33%	0%	BPBD Kota Dumai
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	5 Laporan	Rp	4.320.106.523	219,99	Rp	2.618.311.607	1 Laporan	140.508.000	0	0	1	0	220,99	Rp	2.618.311.607	4420%	61%	BPBD Kota Dumai
	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	30 Dokumen	Rp	5.529.429.235	256,86	Rp	836.258.347		175.969.000	0	23.960.000	15	23.960.000	271,86	Rp	860.218.347	906%	16%	BPBD Kota Dumai
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	Rp	255.000.000				1 Dokumen	30.000.000	0	0	1	0	1	Rp	-	33%	0%	BPBD Kota Dumai
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	Rp	204.000.000				1 Dokumen	11.046.500	0	0	1	0	1	Rp	-	33%	0%	BPBD Kota Dumai
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	3 Dokumen	Rp	1.000.000.000				1 Dokumen	30.000.000	0	480.000	1	480.000	1	Rp	480.000	33%	0%	BPBD Kota Dumai
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Birwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3 Laporan	Rp	230.600.000				1 Laporan	12.030.000	0	0	1	0	1	Rp	-	33%	0%	BPBD Kota Dumai
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RRP) Kabupaten/Kota yang dilegalakan	8 Kegiatan	Rp	831.154.000	256,86	Rp	836.258.347	2 Kegiatan	36.829.000	0	23.480.000	2	23.480.000	258,86	Rp	859.738.347	3236%	103%	BPBD Kota Dumai

	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana KabupatenKota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana KabupatenKota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	13 Lembaga	Rp	383.500.000	4 Lembaga	15.520.000	0	0	0	0	0	0	4	0	4	Rp	-	31%	0%	BPBD Kota Dumai
	Facilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	6 Laporan	Rp	324.000.000	2 Laporan	14.000.000	0	0	0	0	0	0	2	0	2	Rp	-	33%	0%	BPBD Kota Dumai
	Penguatan Kelembagaan Bencana KabupatenKota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	3 Dokumen	Rp	360.000.000	1 Dokumen	12.273.500	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Rp	-	33%	0%	BPBD Kota Dumai
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen	Rp	399.175.235	2 Dokumen	14.270.000	0	0	0	0	0	0	2	0	2	Rp	-	50%	0%	BPBD Kota Dumai
	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Unsur Bencana KabupatenKota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Unsur Bencana KabupatenKota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen	Rp	350.000.000	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-	0%	0%	BPBD Kota Dumai
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana KabupatenKota	Jumlah Aparatur BPBD KabupatenKota dan lintas perangkat daerah KabupatenKota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	78 Orang	Rp	860.000.000	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-	0%	0%	BPBD Kota Dumai
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana KabupatenKota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	23 Orang	Rp	332.000.000	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-	0%	0%	BPBD Kota Dumai
							7.368.702.650,75	1.103.723.975	1.563.673.341	2.667.397.316											
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam "tujuan berikutnya":																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																					

*1 Diisi oleh Kepala BAPPEDA

Disusun
Dumai, Tanggal 10 Juli 2025
Kepala Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai



(IRAWAN SUKMA, AP., M. SI)

Dievaluasi
Dumai, Tanggal...
Kepala Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab/Kota.....

Pada Tabel 2.1 diatas tersaji tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai berdasarkan indikator kinerja pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025 terdapat program/kegiatan yang pencapaiannya belum sesuai target kegiatan seperti yang telah ditetapkan karena belum melaksanakan kegiatan tersebut secara keseluruhan di tahun 2025. Lalu beberapa dari subkegiatan telah dicairkan pada tahun 2025 untuk tunda bayar 2024. Berikut adalah penjabaran :

- A. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum mengakomodir pencairan keuangan
- B. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat beberapa sub kegiatan yang sudah pencairan dan ada juga yang belum mengakomodir pencairan keuangan, yaitu:
 - pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sudah ada pencairan anggaran untuk pembayaran gaji hingga bulan juni
 - pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sudah ada pencairan anggaran untuk penyusunan laporan
 - pada kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran belum mengakomodir pencairan anggaran
- C. Pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah belum mengakomodir pencairan keuangan
- D. Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak ada pencairan keuangan karena tidak menetapkan target tahun ini
- E. Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat beberapa sub kegiatan yang sudah pencairan dan ada juga yang belum mengakomodir pencairan keuangan, diantaranya:
 - pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sudah ada pencairan anggaran pembayaran paket pada sub kegiatan
 - pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sudah ada pencairan anggaran untuk pembayaran paket pada sub kegiatan
 - pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sudah ada pencairan anggaran untuk pembayaran paket pada sub kegiatan
 - Pada kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan blm mengakomodir pencairan keuangan
 - pada sub Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sudah ada pencairan anggaran untuk pelaksanaan penyusunan dokumen serta tunda bayar 2024
 - pada kegiatan Penyediaan Bahan/Material blm mengakomodir pencairan keuangan

- pada sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sudah ada pencairan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan serta tunda bayar 2024
 - pada sub Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD sudah ada pencairan anggaran untuk pelaksanaan penyusunan dokumen
- F. Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat beberapa sub kegiatan yang sudah pencairan untuk pelaksanaan dan tunda bayar 2024 dan ada juga yang belum mengakomodir pencairan keuangan, diantaranya:
- Pada kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak ada pencairan keuangan karena tidak menetapkan target tahun ini
 - Pada kegiatan Pengadaan Mebel belum mengakomodir pencairan keuangan
 - Pada sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sudah melakukan pencairan anggaran untuk tunda bayar tahun 2024
- G. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat sub kegiatan yang sudah pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan, yaitu:
- pada sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sudah ada pencairan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
 - pada sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sudah ada pencairan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
 - pada sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sudah ada pencairan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun ini serta pencairan anggaran tunda bayar 2024
- H. Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat beberapa sub kegiatan yang sudah pencairan dan ada juga yang belum mengakomodir pencairan keuangan, diantaranya:
- pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pencairan pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4 telah dilaksanakan dan telah dilakukan pembayaran terhadap pemeliharaan tahun 2025 serta tunda bayar 2024
 - pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya belum mengakomodir pencairan keuangan
 - pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya belum dibayarkan karna belum terakomodir pencairannya serta tunda bayar tahun 2024
- I. Pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota belum mengakomodir pencairan keuangan
- J. Pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana belum mengakomodir pencairan keuangan namun ada satu sub kegiatan yang dimunculkan

kembali pada tahun 2025 untuk mencairkan anggaran pada tunda bayar tahun 2024 yaitu pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

- K. Pada kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana terdapat satu sub kegiatan yang sudah pencairan anggaran untuk Bahan Bakar Minyak pada pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan tunda bayar 2024 yaitu pada sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- L. Pada kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana terdapat beberapa sub kegiatan yang sudah pencairan untuk tunda bayar 2024, yaitu:
 - pada sub kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan sudah ada pencairan anggaran untuk Perjalanan Dinas tunda bayar tahun 2024
 - pada sub kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota sudah ada pencairan anggaran untuk tunda bayar tahun 2024

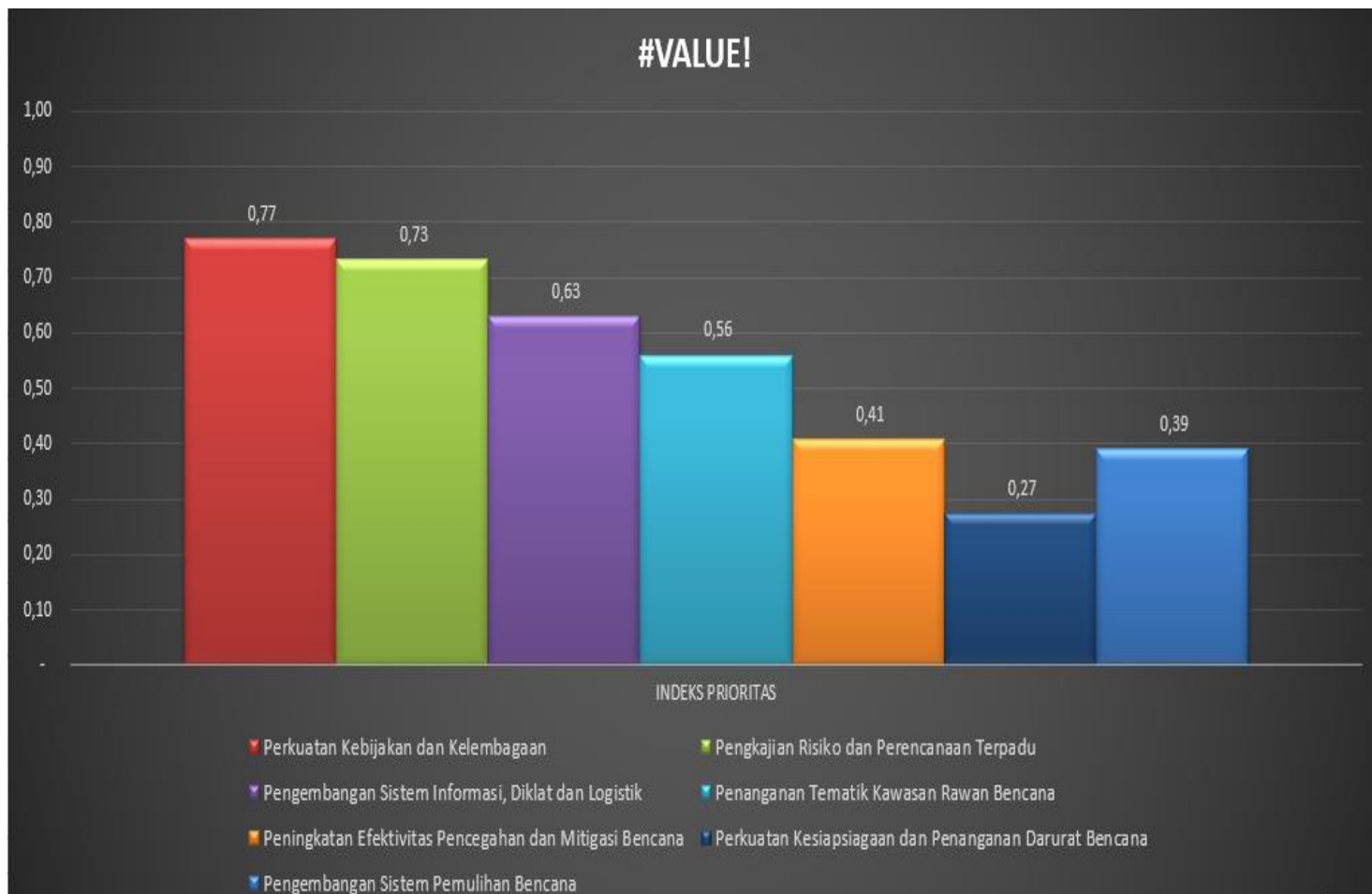
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 ini seyogyanya dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang diukur pencapaiannya melalui keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Dumai, tiga IKU tersebut antara lain: (1) Presentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana, dengan perhitungan Jumlah Desa/kelurahan dibagi dengan Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. (2) Cakupan Wilayah Layanan Penanganan Bencana, dengan Jumlah luasan wilayah penanganan bencana (3) Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dengan satuan Indek dan dasar perhitungan IKD berdasarkan 71 indikator, dengan klasifikasi nilai : $IKD \leq 0,4 = \text{"RENDAH"}$, $0,4 \leq IKD \leq 0,8 = \text{"SEDANG"}$, $IKD \geq 0,8 = \text{"TINGGI"}$. Pada indicator Indeks Ketahanan Daerah terdapat penilaian terhadap seluruh kabupaten Kota dengan indicator sebagai berikut:

Gambar 2.1
Form Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah BPBD Kota Dumai

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,77	0,43	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,73		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,63		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,56		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,41		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,27		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,39		

NO.	PRIORITAS	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
1	INDEKS PRIORITAS	0,77	0,73	0,63	0,56	0,41	0,27	0,39
2	INDEKS KAPASITAS DAERAH	0,43						



Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada tahun 2024 berdasarkan LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2024

No	Sasaran		2024			
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1.	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Bencana	Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	100%	100 %	100 %	Sangat Berhasil
		Indeks Ketahanan Daerah	0,52	0,43	97,44%	Sangat Berhasil
		Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana	30,56 %	30,56 %	100 %	Sangat Berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2024

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Cakupan Wilayah Penanganan Bencana

- a. Capaian Kinerja untuk Cakupan Wilayah Penanganan Bencana menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi.
- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Cakupan Wilayah Penanganan Bencana sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Adanya penambahan petugas lapangan kebencanaan
 - Adanya pembentukan MPA disetiap kelurahan rawan bencana terutama pada kelurahan rawan bencana karhutla
 - Tersedianya sapras disetiap kelurahan rawan bencana berupa mesin dan sarana transportasi berupa kendaraan roda 2 untuk penggunaan sementara kepada kelurahan rawan bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - Adanya keterlibatan OPD lain atau instansi vertikal baik TNI atau Polri dan Basarnas dalam penanggulangan penanganan bencana
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Cakupan Wilayah Penanganan Bencana adalah sebagai berikut:
 - Belum adanya regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Walikota (Perwa) perjenis ancaman bencana sebagai dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - Belum adanya penataan sistem Aktivasi komando penanganan darurat bencana baik bencana alam/non alam dan Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit serta respon cepat bencana kegagalan teknologi
 - Belum adanya Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan yang terintegrasi yang cepat dan tanggap dengan pemasangan atau penggunaan Early Warning System (EWS) perjenis ancaman bencana
 - Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur BPBD terutama aparatur yang mempunyai kompetensi kebencanaan
 - Belum adanya dokumen rencana kontijensi pada setiap jenis ancaman bencana yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan operasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - Belum adanya SOP penanggulangan bencana
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Cakupan Wilayah Penanganan Bencana adalah sebagai berikut:
 - Melakukan penyusunan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dan

- Peraturan Walikota (Perwa) perjenis ancaman bencana sebagai dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- Menyusun rencana kontijensi perjenis ancaman bencana sesuai dengan karakteristik kawasan rawan bencana;
 - Pembentukan Forum pengurangan risiko bencana dengan melibatkan Forum Pentahelix (unsur Pemerintah, Masyarakat, Bidang Usaha, Akademisi dan Media);
 - Peningkatan kualitas SDM petugas lapangan kebencanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi nya.

2. Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

- Capaian Kinerja untuk indicator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menunjukkan capaian yang belum sesuai dengan target. Sedangkan target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 0,52%, realisasi sebesar 0,43%, tercapai 83% atau bernilai kinerja tinggi atau berhasil walaupun belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024. Pada tahun 2023, IKD Kota Dumai memiliki capaian sebesar 0,34% sehingga pada tahun 2024 lebih tinggi.
- Faktor pendukung/pendorong capaian indicator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dapat di dukung oleh Organisasi Perangkat Daerah lainnya target yang yang mana pada Indikator ini bersifat Crosscutting dengan artian data dukung bisa di dapat sebagai berikut:
 - Dukungan data atau dokumen untuk melengkapi 71 indikator dengan 284 data dukung bisa di dapat dari Oraganisasi perangkat daerah dan organisasi vertical yang berada di Kota Dumai;
 - Terdapat perubahan IKU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang dilakukan pada tahun 2024, dan menjadikan Indek Ketahanan Daerah sebagai IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai;
- Faktor penghambat Capaian Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah sebagai berikut:
 - Belum optimalnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana per jenis bencana;
 - Belum optimalnya Forum pengurangan risiko bencana yang melibatkan Forum Pentahelix;
 - Kurangnya kepedulian OPD/instansi vertikal lainnya dalam memenuhi data dukung capaian Indeks Ketahanan Daerah
 - Belum adanya sinergitas antara OPD dan Instansi Vertikal lainnya dalam mendukung peningkatan Indeks Ketahanan Daerah yang akan menjadi penilaian pusat terhadap Daerah dalam penetapan Indeks Risiko Bencana Daerah.
- Tindak lanjut Capaian Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah sebagai berikut:
 - Menyusun regulasi yang mendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- Menyusun SOP penanganan penanggulangan bencana;
- Pembentukan Forum pengurangan risiko bencana dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota
- Meningkatkan sarana/prasarana dan pemenuhan logistik kebencanaan dalam pelayanan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana

3. Indikator Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana

- a. Capaian Kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 30,56%, realisasi sebesar 30,56%, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi.
- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana telah sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan adanya data dukung sebagai berikut:
 - Adanya Peraturan Kepala (Perka) BNPB No.1 tahun 2012 tentang pembentukan pedoman Destana (Desa Tangguh Bencana);
 - Adanya pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai No.360/828/2024 tentang Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana
 - Adanya Adanya pembentukan Destana yang diprakarsai oleh BPBD Provinsi
 - Adanya pembentukan Kampung Siaga Bencana yang diprakarsai oleh Dinas Sosial Kota Dumai
 - Adanya dukungan pendanaan pada masing-masing Kelurahan yang dianggarkan untuk sosialisasi atau biaya operasi dalam pengurangan risiko bencana
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebagai berikut:
 - Belum optimalnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana per jenis bencana;
 - Belum adanya Rencana Kontigensi yang merupakan kesepakatan bersama atau komitmen bersama dalam penanggulangan bencana melalui penetapan skenario dan pembagian tugas masing-masing Dinas/OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau Instansi vertikal lainnya yang terkait langsung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta belum adanya FGD Mitigasi bencana;
 - Belum terbentuknya relawan kebencanaan disetiap kecamatan atau kelurahan.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan dalam efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan melibatkan Forum Pentahelix;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
- Meningkatkan rasa kepedulian masyarakat untuk menjadi relawan peduli bencana dan mendorong masyarakat bahwa bencana adalah merupakan tanggungjawab Bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Tabel 2.3 T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase 4 Jenis Bencana yang Ditangani			80				93,75%				
2.	Persentase Penanggulangan dan Penanganan Bencana			78.21				97,44%				
3.	Response Time Rate Kejadian Bencana			100				91,30%				
4.	Cakupan Wilayah Penanganan			56.42	100	100	100	97,21%	100%	100	100	
5.	Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana				30,56	61,11	100		100%	61,11	100	
6.	Indeks Ketahanan Daerah				43	45	■		100%	45	■	

Dari tabel indikator diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 3 Indikator Kinerja Utama yang mana pada tahun 2024 mencapai target realisasi dengan persentase 100%. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan lebih meningkatkan kualitas penanganan bencana daerah pada tahun kedepan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Dumai

- a. Identifikasi Permasalahan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Identifikasi permasalahan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karena itu dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan melakukan pemetaan wilayah sesuai dengan ancaman dan karakteristik alam dan lingkungan terhadap bencana yang disebabkan oleh alam maupun non alam sehingga peningkatan kapasitas masyarakat yang rentan terhadap bencana dan penataan serta penyampaian informasi rawan bencana menjadi fokus utama dalam mengidentifikasi akar masalah dalam sub urusan bencana Adapun identifikasi permasalahan yang dimaksud tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Pra Bencana	Belum adanya pembentukan Unit Reaksi Cepat Terpadu Kegawatdaruratan dan Penyelamatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial	Belum adanya pembentukan TIM terpadu yang terdiri dari berbagai unsur Perangkat Daerah dan Instansi vertical dalam pelayanan dan penanganan bencana
		Belum memiliki, Rencana kontijensi yang sewaktu-waktu terjadi bencana menjadi Rencana Operasi (REN OP)	Belum adanya Regulasi baik berupa Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dan Peraturan Walikota perjenis ancaman bencana yang menjadi dasar pelaksanaan rencana operasi
		Belum adanya SOP dan MOU, kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta rencana aksi daerah dalam pengurangan Risiko Bencana	Belum adanya SOP dan kerjasama antar lembaga, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan media dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra bencana, saat terjadi bencana dan pascabencana
2	Darurat Bencana	Belum adanya Regulasi dan Rencana Operasi Kedaruratan perjenis ancaman bencana	Belum adanya regulasi yang mengatur khusus tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pentapan staus darurat atau peralihan status dari siaga sampai dengan pemulihan dan belum adanya Rencana Operasi Penanggulangan Kedaruratan bencana

		Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana	Belum tersedianya PUSDAL OP PB, Belum adanya Gudang peralatan dan gudang logistik, Workshop, dan belum lengkapnya Peralatan dan kelengkapan dalam penanganan kedaruratan
		Kurangnya kapasitas personil dalam penanganan kedaruratan	Belum Optimalnya peningkatan kapasitas personil sesuai dengan tugas dan fungsi
3	Pasca Bencana	Masih terkendalanya data dan Informasi korban terdampak serta nilai kerusakan dan kerugian Pascabencana	Belum optimalnya pendataan penduduk di kawasan atau daerah rawan bencana
		Belum adanya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga penanganan bersifat parsial.	Belum adanya FGD yang berkomitmen dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan membuat MoU kesepakatan bersama dalam penanggulangan Bencana
		Belum Adanya kerjasama antar daerah di kawasan terdampak bencana	Belum terkoodinasinya penanganan bencana di daerah perbatasan dengan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah di perbatasan dengan membuat MoU kerjasama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib Bidang Trantibum linmas Sub Urusan bencana kapupaten/kota. Dalam menjalankan tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi tanggungjawab daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Kota Dumai memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Melaksanakan Fungsi koordinasi, komando dan pelaksana pada kegiatan Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Instansi lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
4. Pengkomandoan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
5. Pelaksanaan kegiatan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan

kerja perangkat daerah lainnya, instansi dengan dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai mendukung pencapaian Misi ke 4 Kota Dumai, yaitu “**Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**”. Adapun program prioritas yang direncanakan untuk mendukung pencapaian misi ke 4 tersebut adalah Program penanganan penanggulangan bencana.

Jika disandingkan dengan hasil identifikasi permasalahan seperti yang tersaji pada Tabel 2.3 diatas maka program dan kegiatan prioritas yang direncanakan untuk mendukung pencapaian misi keempat tersebut sekaligus pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai terkait pelayanan dasar minimal sub-urusan bencana yang menjadi tugasnya dan menyelaraskan dengan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Program penanggulangan Bencana dengan kegiatan prioritas:

1. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
5. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

b. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang tersaji pada Tabel 2.3 diatas, terdapat beberapa tantangan dan tuntutan dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan meningkatkan kapasitas masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana, masyarakat yang mampu bangkit ketika menjadi terdampak bencana dengan dan kekuatan yang bersumber dari pengetahuan masyarakat yang mampu bertahan dan dapat mengurangi risiko bencana secara Resilien, dan mampu dengan dengan cepat untuk kembali bangkit ketika terdampak bencana yang tentunya menjadi tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam mensosialisasikan informasi rawan bencana, memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendukung kesiapsiagaan masyarakat Kota Dumai menuju masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana.

c. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota/Wakil Walikota

Mengacu kepada Visi, Misi dan Program Prioritas Walikota/Wakil Walikota terpilih tahun 2025, maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2025 yaitu **“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Kokoh, Dengan Masyarakat Yang Bertumpu Pada Budaya Melayu,(Dumai Kota Idaman)”**. Untuk merealisasikan Visi pembangunan Kota Dumai pada Tahun 2024, maka ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu;
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Seperti yang telah dijelaskan diatas, sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai mendukung pencapaian program prioritas dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Terkait dengan hal tersebut, beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota/Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Berdasarkan Telaah Visi, Misi dan Program Tahun 2021-2026

Faktor Penghambat		Faktor Pendorong	
Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang penanggulangan bencana (PERDA) dan Petunjuk teknisnya dijabarkan dalam peraturan Walikota - Masih rendahnya ASN dan tenaga kebencanaan yang memiliki sertifikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; - Belum lengkapnya sarana dan prasarana serta peralatan kebencanaan - Belum optimalnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana - Pengurangan resiko bencana masih belum menjadi bagian terpadu dalam perencanaan pembangunan daerah - Belum adanya Forum Group Diskusi (FGD) yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana yang semula Badan dengan Klasifikasi B ditingkatkan menjadi Badan dengan Klasifikasi A dengan terbitnya Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai; - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebencanaan yang didukung oleh pendanaan APBD dan pedanaan yang bersumber 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pelaku usaha atau perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan telah membentuk satuan regu pemadam kebakaran lahan dan hutan; - Adanya dukungan dari BPBD Provinsi dan instansi Vertikal lainnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana; - Adanya dukungan

Faktor Penghambat		Faktor Pendorong	
Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana; - Belum optimalnya Program Kegiatan dan Sub kegiatan yang selaras dengan apa yang menjaddalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	didukung dengan perjanjian kerjasama dalam bentuk MOU penanggulangan bencana adalah merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia Usaha, Akademisi dan Media -	dari dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) serta sumber pendanaan lainnya yang syah dan tidak mengikat;	pendanaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Hibah (APBN BNPB melalui DSP atau RR), Dana BTT, yang bisa diusulkan dalam kondisi tertentu dengan persyaratan yang sesuai dengan aturan yang berlaku

Sumber : Dokumen Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

d. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis, mengacu kepada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai serta gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, Perubahan Iklim merupakan perubahan sidnipikan dari unsur iklim diantara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode dasawarsa hingga jutaan tahun, perubahan iklim diawali dengan adanya pemanasan global yaitu kondisi dimana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbondioksida, metana, nitrogen dan sebagainya sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfir semakin meningkat, peningkatan gas rumah kaca ini berasal dari proses industrialisasi pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan serta penggunaan ploro-ploro karbon atau CPC untuk penggunaan aerosol.

Diantara bukti perubahan iklim adalah kenaikan tinggi muka laut hingga wilayah pantai berkurang atau terjadinya abrasi, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkat kejadian cuaca ekstrim, hingga menyebabkan banjir dan pasang Rob, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya hama pada tanaman, kekeringan yang panjang, mencairnya es di kutub, yang dampaknya sangat, untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim tersebut. membahayakan

Dalam konsteks nasional, pengendalian perubahan iklim merupakan amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Negara memberikan arah dan berkewajiban memastikan agar pembangunan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan

perlindungan aspek lingkungan dan sosial.

Dengan adanya kesadaran akan ancaman dari dampak-dampak negatif perubahan iklim bukan merupakan suatu beban bagi negara semata, akan tetapi sudah saatnya menjadi suatu kebutuhan Bersama dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan, masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media. Dengan demikian komitmen negara dalam menangani perubahan iklim merupakan agenda nasional, begitu juga dengan bencana non alam dengan seiring perkembangan dan kemajuan dari berbagai aspek kehidupan yang memungkinkan terjadinya human eror atau kegagalan teknologi yang menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memandang secara Holistik yaitu dengan memandang secara keseluruhan pada fase pra bencana, fase saat terjadinya bencana dan pada fase pascabencana menjadi salahsatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan melibatkan unsur pentahelix, sehingga dalam pelaksanaannya penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media sehingga terjalin kolaborasi dan membangun budaya siaga bencana.

Penetapan isu penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut berkenaan dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Memperkuat kerjasama para pihak dalam pengembangan teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dengan memperhatikan karakteristik risiko bencana, kearifan lokal, dan ketersediaan sumber daya dalam rangka mendorong industrialisasi teknologi di bidang kebencanaan;
2. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana melalui inisiatif kolaborasi dan kemitraan berdasarkan Rencana Aksi Pemenuhan SPM, serta Mendorong BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Bappeda untuk melakukan sinkronisasi program dan anggaran penanggulangan bencana di daerah agar selaras dengan perencanaan di pusat (BNPB);
3. Melakukan upaya penguatan kapasitas personil, sumberdaya, dan kelembagaan penanggulangan bencana melalui transformasi tata kelola, peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan sarana prasarana, secara bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan;
4. Memperkuat tata kelola kedaduratan dan logistik, serta ,meningkatkan sistem kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi dalam suatu sistem berbasis teknologi informasi;
5. Mempercepat implementasi berbagai inisiatif strategi pembiayaan alternatif (termasuk *Pooling Fund* Bencana) untuk pra darurat dan pasca bencana dengan memperhatikan

- kapasitas fiskal dan risiko bencana di daerah, serta memperhatikan tata kelola anggaran kebencanaan yang akuntabel;
6. Mendorong implementasi Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) sebagai Big Data dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan monitoring evaluasi sistem nasional penanggulangan bencana secara komprehensif dan terukur, selaras dengan komitmen percepatan digitalisasi layanan pemerintah.
 7. Membangun komitmen BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi pengaduan masyarakat terkait isu-isu di bidang penanggulangan bencana berbasis elektronik, untuk mewujudkan akuntabilitas penanggulangan bencana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat
 8. Mendorong terbentuknya mekanisme respon kedaduratan di tingkat daerah melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota, (berdasarkan Surat Mendagri 350/1809/BAK tanggal 4 April 2022)
 9. Mendorong Pemerintah Daerah membentuk tim Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana, menyusun R3P dengan melibatkan pentahelix, memasukkan bidang PR dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), melakukan pemulihan baik yang bersifat konstruksi maupun non-konstruksi yang efektif dan efisien, serta mendorong kembali keberadaan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi di BPBD melalui KL terkait.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai telah melakukan perbaikan secara bertahap dengan adanya peningkatkan status kelembagaan dengan peningkatan kelas dari klasifikasi B menjadi Klasifikasi A. Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan tujuan untuk mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam menjalankan fungsi Komando, fungsi koordinasi dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Sub Urusan Bencana Kabupaten/kota serta pengurangan risiko bencana bisa terlaksana dengan baik.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak terlepas dari analisa penghitungan nilai ancaman, kerentanan dan kapasitas, risiko bencana akan bisa dikurangi, diminimalisir bahkan dihilangkan ketika masyarakatnya memiliki kapasitas yang kuat serta dukungan infrastruktur yang memadai, risiko bencana akan seimbang ketika suatu daerah dengan ancaman bencana tertentu yang bisa membahayakan masyarakat atau disebut juga dengan kerentanan, kerentanan tersebut bisa diminimalisir dengan cara melakukan pencegahan melalui infrastruktur serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan simulasi terhadap pencegahan dan penanganan ancaman berdasarkan karakteristik daerah masing-masing, dalam manajemen penanggulangan

bencana dikenal dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Risiko Bencana} \approx \text{Ancaman} * \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Dari rumusan diatas dapat dilihat ancaman bisa diminimalisir ketika kerentanan atau masyarakat yang termasuk kedalam kategori rentan ditingkatkan kapasitasnya, sehingga ketika terjadi bencana masyarakat mampu bertahan dan mampu bangkit ketika bencana terjadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai mempunyai kerangka acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Peningkatan status kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, serta pemisahan UPT Pemadam Kebakaran yang terjadi pada awal tahun 2024 menjadi salahsatu faktor yang mengharuskan untuk dilakukan perubahan terhadap rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024.

Hal ini sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang tentunya mengakibatkan terjadinya penambahan serta pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan rutin wajib 12 Bulan seperti Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pemeliharaan gedung kantor, Pengadaan Peralatan dan Mesin, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Logistik Kantor, Rapat-Rapat Koordinasi serta kebutuhan lainnya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemenuhan standar pelayanan minimal pada sub urusan bencana kabupaten/kota pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai untuk mendukung prioritas pembangunan Daerah, dan prioritas Perangkat Daerah maupun pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana urusan pemerintah daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai di tahun 2025 merencanakan untuk melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan, dengan mempertimbangkan perkembangan permasalahan lingkungan yang dihadapi. Adapun kegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2025, yaitu :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.5 Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisaasi anggaran
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - 3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 3.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 4.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5.6 Penyediaan Bahan/Material
- 5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.2 Pengadaan Mebel
 - 6.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
- 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 2.1 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
 - 2.2 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 - 2.3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.4 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 3.1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
 - 3.2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - 3.3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - 3.4 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
 - 3.5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
 - 3.6 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - 3.7 Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit
 - 3.8 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- 4.1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- 4.2 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- 4.3 Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- 4.4 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- 4.5 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota

Tabel 3.1

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																						
									15.371.265.395,00	7.451.711.880,00	7.325.207.930,75	-8.046.057.464,25							9.507.009.800,00					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.371.265.395,00	7.451.711.880,00	7.325.207.930,75	-8.046.057.464,25							9.507.009.800,00					
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15.371.265.395,00	7.451.711.880,00	7.325.207.930,75	-8.046.057.464,25							9.507.009.800,00					
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)	100 %	100 %				9.892.865.395,00	5.841.711.880,00	6.167.124.465,85	-3.725.740.929,15							6.948.313.125,00					
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						12 dokumen/laporan	10 dokumen/laporan	23.660.555,80	-52.939.444,20							72.800.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA DAERAH			
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3 Dokumen	3 Dokumen	19.800.000,00	0,00	4.202.600,00	-15.597.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN Pemerintahan Daerah 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN Pemerintahan Daerah	ASN BPBD Kota Dumai		18.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN Pemerintahan Daerah 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN Pemerintahan Daerah		16.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2 Dokumen	1 Dokumen	11.200.000,00	0,00	1.250.000,00	-9.950.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN Pemerintahan Daerah 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN Pemerintahan Daerah		11.200.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						2 Dokumen	2 Dokumen	9.800.000,00	0,00	2.203.620,00	-7.596.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN Pemerintahan Daerah 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN Pemerintahan Daerah		9.800.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3 Laporan	3 Laporan	19.800.000,00	10.000.000,00	15.004.335,80	-4.795.664,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN Pemerintahan Daerah 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN Pemerintahan Daerah		17.800.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen /Laporan administrasi keuangan perangkat daerah						5 dokumen	4 dokumen	3.657.900.000,00	2.989.758.520,00	3.402.818.823,00	-255.081.177,00						ASN BPBD Kota Dumai		3.089.314.245,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	3.600.000.000,00	2.964.758.520,00	3.385.307.040,00	-214.692.960,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					3.044.414.245,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2 Laporan	2 Laporan	23.400.000,00	15.000.000,00	11.011.783,00	-12.388.217,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					15.400.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD																						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulana n/Semesteran SKPD						2 Laporan	1 Laporan	13.500.000,00	0,00	1.321.000,00	-12.179.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					13.500.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	10.000.000,00	5.179.000,00	-15.821.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			16.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6 laporan	2 laporan	37.000.000,00	19.800.000,00	25.100.000,00	-11.900.000,00			-		ASN BPBD Kota Dumai		25.800.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	9.700.000,00	0,00	0,00	-9.700.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	19.800.000,00	19.800.000,00	25.100.000,00	5.300.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				25.800.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen /Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis				1 dokumen 23 Orang	0 dokumen 0 Orang	381.195.000,00	50.000.000,00	0,00	-381.195.000,00			-		ASN BPBD Kota Dumai		0,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	0 Unit	56.000.000,00	0,00	0,00	-56.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	0 Paket	99.000.000,00	0,00	0,00	-99.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	0 Orang	89.935.000,00	0,00	0,00	-89.935.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	0 Orang	136.260.000,00	50.000.000,00	0,00	-136.260.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				4 dokumen	3 dokumen	1.125.030.295,00	349.860.000,00	314.163.767,05	-810.866.527,95			-		ASN BPBD Kota Dumai		701.850.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.000.000,00	15.000.000,00	17.383.010,00	-54.616.990,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				28.350.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	154.670.295,00	75.000.000,00	53.557.094,05	-101.113.200,95	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				67.500.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	125.000.000,00	30.000.000,00	38.382.583,00	-86.617.417,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				110.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-23.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				15.500.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.860.000,00	9.860.000,00	5.050.000,00	-4.810.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				4.500.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46.000.000,00	0,00	16.770.000,00	-29.230.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			18.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	485.000.000,00	200.000.000,00	168.653.080,00	-316.346.920,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			380.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	199.500.000,00	10.000.000,00	9.368.000,00	-190.132.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			78.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15 unit	35 unit	1.108.700.000,00	200.000.000,00	128.956.750,00	-979.743.250,00			-	-	ASN BPBD Kota Dumai		191.700.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	18 Unit	168.000.000,00	0,00	57.670.000,00	-110.330.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			75.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	800.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	17 Unit	126.700.000,00	0,00	71.286.750,00	-55.413.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			116.700.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4 Laporan	3 Laporan	2.326.630.100,00	1.772.293.360,00	1.705.249.520,00	-621.380.580,00			-	-	ASN BPBD Kota Dumai		2.031.158.880,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	25.500.000,00	0,00	0,00	-25.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	171.802.100,00	115.000.000,00	115.300.000,00	-56.502.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			140.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	149.328.000,00	149.328.000,00	99.495.200,00	-49.832.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			194.860.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.980.000.000,00	1.507.965.360,00	1.490.454.320,00	-489.545.680,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.696.298.880,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				101 unit	189 unit	1.179.810.000,00	450.000.000,00	567.175.050,00	-612.634.950,00			-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN BPBD Kota Dumai		835.690.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	106 Unit	833.570.000,00	364.070.000,00	393.187.000,00	-440.383.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			595.200.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	82 Unit	125.000.000,00	85.930.000,00	66.700.050,00	-58.299.950,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			120.490.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUH JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	221.240.000,00	0,00	107.288.000,00	-113.952.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			120.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGUH BENCANA
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA				100 %	100 %	5.478.400.000,00	1.610.000.000,00	1.158.083.464,90	-4.320.316.535,10							2.558.696.675,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana yang mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				600 orang	1000 orang	256.700.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	-211.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		256.700.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGUH BENCANA
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				5000 Orang	1000 Orang	256.700.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	-211.700.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			256.700.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGUH BENCANA
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				2 dokumen	3 dokumen	1.561.000.000,00	600.000.000,00	485.613.292,70	-1.075.386.707,30			Memperkuat reformasi politik, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		930.529.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGUH BENCANA
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				4 Kegiatan	4 Kegiatan	160.000.000,00	50.000.000,00	25.680.000,00	-134.320.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			145.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGUH BENCANA
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				50 Unit	50 Unit	190.000.000,00	100.000.000,00	38.331.413,70	-151.668.586,30	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			197.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGUH BENCANA
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				800 Orang	617 Orang	95.000.000,00	50.000.000,00	39.000.000,00	-56.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			35.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGUH BENCANA
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				12 Keluarga	65 Keluarga	185.000.000,00	100.000.000,00	70.083.232,00	-114.916.768,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			32.529.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGUH BENCANA
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				2 Kawasan	2 Kawasan	200.000.000,00	50.000.000,00	21.708.000,00	-178.292.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			200.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGUH BENCANA
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				12 Orang	0 Orang	140.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-140.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			0,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGUH BENCANA
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	50.000.000,00	51.448.000,00	-88.552.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			140.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0 Dokumen	96.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-96.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			0,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	1 laporan	99.000.000,00	50.000.000,00	9.150.000,00	-89.850.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			50.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				-	1 Dokumen	0,00	0,00	193.603.600,00	193.603.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			96.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				18 Kawasan	2 Kawasan	256.000.000,00	50.000.000,00	36.609.047,00	-219.390.953,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			35.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		
			Jumlah Dokumen pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				5 dokumen	4 dokumen	1.937.200.000,00	600.000.000,00	383.501.172,20	-1.553.698.827,80			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		249.400.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	68.000.000,00	30.000.000,00	5.791.747,20	-62.208.252,80	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			12.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	150.000.000,00	133.643.125,00	-31.356.875,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			45.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	50 Orang	243.500.000,00	50.000.000,00	15.087.500,00	-228.412.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			25.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal				1 Dokumen	0 Dokumen	45.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			0,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				20 Orang	20 Orang	250.000.000,00	50.000.000,00	26.589.800,00	-223.410.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			45.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH PENANGGU BENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				20 Orang	20 Orang	372.700.000,00	50.000.000,00	22.500.000,00	-350.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH			25.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit																			
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				1 Dokumen	1 Dokumen	93.000.000,00	50.000.000,00	22.881.000,00	-70.119.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH			9.400.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	200.000.000,00	157.008.000,00	-542.992.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH			88.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana																			
			Jumlah Dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana				10 dokumen	9 dokumen	1.723.500.000,00	360.000.000,00	243.969.000,00	-1.479.531.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		1.122.067.675,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH			35.567.675,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	68.000.000,00	30.000.000,00	11.046.500,00	-56.953.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH			68.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																			
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	-205.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																			
			Jumlah Laporan Hasil Birwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	71.500.000,00	30.000.000,00	25.030.000,00	-46.470.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH			71.500.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				4 Orang	0 Orang	78.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-78.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH			0,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				26 Orang	0 Orang	285.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-285.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH			0,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan</i>				2 Kegiatan	2 Kegiatan	250.000.000,00	30.000.000,00	36.829.000,00	-213.171.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
1.05.03.2.04.0011		Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal</i>				4 Lembaga	4 Lembaga	143.000.000,00	30.000.000,00	15.520.000,00	-127.480.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH			30.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
1.05.03.2.04.0012		Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota																			
			<i>Jumlah data penduduk terpih di daerah rawan bencana</i>				2 Laporan	2 Laporan	108.000.000,00	30.000.000,00	14.000.000,00	-94.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH			32.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
1.05.03.2.04.0014		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	30.000.000,00	12.273.500,00	-107.726.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH			120.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
1.05.03.2.04.0015		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																			
			<i>Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>				2 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	30.000.000,00	14.270.000,00	-155.730.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH			170.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
1.05.03.2.04.0016		Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAERAH			95.000.000,00	BADAN LANGAN DAERAH	PENANGGU BENCANA
J U M L A H									15.371.265.395,00	7.451.711.880,00	7.325.207.930,75	-8.046.057.464,25							9.507.009.800,00		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 disusun dalam rangka sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Namun terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan yaitu ketidaksesuaian ketersediaan anggaran dengan kebutuhan krusial. Dalam hal ini termasuk pada Sejumlah kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja BPBD belum mengakomodir pencairan anggaran secara maksimal, baik untuk tahun berjalan maupun tunda bayar dari tahun sebelumnya (2024). Beberapa kegiatan masih mengalami keterlambatan dalam realisasi anggaran karena proses administrasi dan penyesuaian RKA belum selesai saat evaluasi Triwulan II dilakukan.

Kaidah pelaksanaan pada Renja Perubahan adalah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Renstra, yang mana Seluruh perubahan program dan kegiatan harus mengacu pada dokumen RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota serta Renstra 2021–2026. Selanjutnya evaluatif dan adaptif. Evaluasi capaian hingga Triwulan II menjadi dasar perubahan; program harus mampu beradaptasi terhadap kebutuhan aktual di lapangan. Pelaksanaan kegiatan perlu mempertimbangkan efektivitas capaian indikator kinerja utama (IKU) seperti: cakupan wilayah penanganan bencana, kelurahan tangguh bencana, dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Terakhir adalah kolaboratif dan partisipatif yang mana Implementasi kegiatan harus melibatkan unsur *Pentahelix* (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, Media) demi mewujudkan ketangguhan masyarakat.

Diharapkan kedepannya dengan mengintegrasikan berbagai sumberdaya dan peran serta Forum Pentahelix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam menyusun perubahan renja ini diharapkan mampu menjawab tuntutan dalam memberikan pelayanan dasar minimal terhadap masyarakat pada sub urusan bencana serta tercapainya tujuan dan sasaran baik dilingkungan internal atau external Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Dumai Juli 2025

Kepala Pelaksana

BPBD Kota Dumai



IRAWAN SUKMA, AP., M.Si

NIP. 19750816 199603 1 004